

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH



**BPPKAD
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan kekuatan dan bimbingan-Nya semata Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 ini dapat disusun.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Tahun 2019 ini dilakukan guna mewujudkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 untuk pelaksanaan tahun ketiga. Disamping itu juga dalam rangka mendukung implementasi arah kebijakan dan program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021.

Materi Rencana Kerja (Renja) SKPD ini mencakup antara lain :

Latar Belakang, Landasan hukum, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, Tupoksi, tujuan, sasaran, Program dan Indikasi Kegiatan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih jauh dari yang diharapkan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat kami nantikan demi perbaikan di masa mendatang.

Demikian harapan kami semoga Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan untuk tahun Anggaran 2019.

KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

WAHYU SUSETIJONO, SH. MM
NIP. 19680418 199303 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPKAD TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPPKAD	10
2.3 Isu-Isu Strategis Tugas dan Fungsi BPPKAD	16
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPPKAD	17
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPPKAD	18
BAB V PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah di wajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D sebagai rencana kerja tahunan.

Sebagai tindak lanjutnya, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM daerah dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKP/D serta mengacu pada hasil-hasil Musrenbang.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD yang memuat program-program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Di dalam Renja SKPD juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra SKPD dan RKP/D sebagai rencana kerja tahunan daerah. Dengan adanya Renja SKPD akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program SKPD lainnya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun Ketiga dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021. Renja-SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun 2005-2025
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan
13. Peraturan daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis BPPKAD Kab. Grobogan tahun 2016-2021
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Grobogan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPKAD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPPKAD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-Isu Strategis Tugas dan Fungsi PD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPPKAD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPPKAD

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, BPPKAD Kab. Grobogan telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2017, BPPKAD Kab. Grobogan secara keseluruhan menganggarkan sebesar Rp. 16.424.715.896,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.583.125.216,- atau total 88,80% dari total alokasi yang ada.

Berikut adalah dana yang dianggarkan beserta realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017 :

Tabel Realisasi Anggaran per Sasaran

SASARAN	PAGU (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya ketepatan dan kebenaran pelaporan keuangan di masing-masing Perangkat Daerah	6.724.761.396	6.049.967.091	89,97%
Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah	7.995.557.500	7.185.642.315	89,87%
Meningkatnya kontribusi pajak dan retribusi dalam PAD	1.384.758.000	1.044.634.560	75,44%
Meningkatnya Perangkat Daerah (PD) dalam pengelolaan asset daerah	319.639.000	302.881.250	94,76%
Total	16.424.715.896	14.583.125.216	88,79%

Evaluasi dan analisis Capaian Kinerja terhadap Setiap indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Renstra BPPKAD Kab Grobogan tahun 2016-2021:

Tabel IKU

Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Kinerja Program Tahun 2017	Realisasi
Keuangan			
Peningkatan PAD	%	11,35	47,21
Opini BPK terhadap Lap Keu Daerah	Opini	WTP	WTP

Capaian kinerja untuk masing-masing program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1	PROGRAM	KEGIATAN	TINGKAT PENCAP AIAN SPM (%)	ANGGARAN	
				ALOKASI	REALISASI
				(Rp)	(Rp)
2	3	4	5	6	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	97,60	92.000.000	89.792.500
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80,94	120.000.000	97.127.754
		3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	67,87	600.000.000	407.231.500
		4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	95,67	100.000.000	95.668.500
		5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	99,83	35.000.000	34.940.000
		6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100,00	25.500.000	25.499.000
		7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor	87,32	192.000.000	167.657.500
		8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100,00	1.000.000.000	999.966.087
		9 Rapat-rapat Koordinasi ke Dalam Daerah	91,81	50.000.000	45.905.150
		10 Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	85,98	49.300.000	42.390.000
		11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Blangko PBB Tahun 2018	91,35	213.870.000	195.380.000
		12 Pembayaran Jasa Sewa Tanah PT. KAI	82,96	544.886.496	452.037.750
		13 Pengelolaan Kebersihan, Keamanan dan Transportasi	95,53	200.000.000	191.057.500
		14 Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Grobogan	60,07	125.000.000	75.092.750

2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	99,03	104.500.000	103.484.000
		2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	94,55	110.000.000	104.010.473
		3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	95,18	100.000.000	95.182.500
		4	Pemeliharaan rutin/berkala computer dan Jaringannya	59,24	97.400.000	57.696.199
		5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPPKAD	90,60	622.000.000	563.555.971
		6	Update Data SISMIOP PBB-P2	100,00	133.383.000	133.383.000
		7	Asistensi SIMDA BMD Kabupaten Grobogan	78,85	61.374.400	48.391.650
		8	Pengadaan Bingkai Kartu Inventarisasi Ruangan (KIR)	100,00	127.510.000	127.510.000
		9	Pengelolaan SIMDA Pendapatan	100,00	41.300.000	41.300.000
		10	Pendampingan Aplikasi Persediaan Barang	0,00	0	0
		11	Pemasangan iklan layanan masyarakat tahun 2017	99,34	162.000.000	160.927.000
		12	Pengadaan Hadiah Lunas PBB-P2 untuk Kecamatan	96,02	75.370.000	72.374.000
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	88,75	153.000.000	135.795.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	99,80	200.000.000	199.599.734
		2	Pembinaan Tehnis Perpajakan Bagi Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	99,01	75.000.000	74.255.000
		3	Bimbingan Tehnis Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018	94,37	342.000.000	322.733.000
		4	Pembekalan Penatausahaan Barang Milik Daerah	98,78	291.867.500	288.304.073
		5	Pendalaman Materi Penatausahaan Keuangan bagi PNS BPPKAD	82,43	285.500.000	235.331.500
		6	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja	92,90	245.000.000	227.608.000
		7	Pembinaan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan bagi PPK-SKPD dan Bendahara Gaji se Kabupaten Grobogan	89,33	75.000.000	66.995.000
		8	Pembinaan Penatausahaan keuangan daerah bagi PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran	95,71	75.000.000	71.785.000

5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Pengelolaan Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan kepada Pemerintahan desa se Kab. Grobogan	89,89	230.000.000	206.750.000
		2	Penyusunan Laporan keuangan DPPKAD selaku SKPD TA. 2016 dan Penatausahaan keuangan BPPKAD Kab. Grobogan TA. 2017	99,17	45.000.000	44.625.000
		3	Penyusunan Pelaporan Pendapatan Daerah	82,74	77.350.000	64.000.000
		4	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja BPPKAD	100,00	48.300.000	48.300.000
		5	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPPKAD	94,47	25.000.000	23.618.000
		6	Pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan BPPKAD	97,69	75.000.000	73.265.000
		7	Penyusunan LPPD dan LKPJ BPPKAD	100,00	25.000.000	25.000.000
		8	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BPPKAD TA. 2017	100,00	40.000.000	40.000.000
		9	Penyusunan Rencana Kegiatan BPPKAD dan PPKD TA. 2018	98,60	50.000.000	49.300.000
		10	Penatausahaan Aset daerah dengan Aplikasi SIMDA BMD	98,73	101.372.000	100.080.000
		11	Peningkatan Perencanaan Anggaran BPPKAD TA. 2017	100,00	55.000.000	55.000.000
		12	Perencanaan dan Realisasi Kebutuhan barang Milik Daerah	88,88	87.532.000	77.801.250
		13	Peningkatan Perencanaan Perubahan BPPKAD TA. 2017	100,00	65.000.000	65.000.000
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB)	59,20	135.000.000	79.926.000
		2	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab. Grobogan TA. 2018	87,59	289.125.000	253.240.000
		3	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kab. Grobogan TA. 2018	91,18	308.550.000	281.325.000
		4	Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2017	91,86	310.310.000	285.045.000
		5	Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2017	92,22	323.550.000	298.370.000

		6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	94,50	355.000.000	335.468.750
		7	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2016	96,85	365.000.000	353.490.750
		8	Pembentukan pengelola keuangan TA. 2017	98,25	40.000.000	39.300.000
		9	Penyediaan Sarana Perbendaharaan	97,74	150.000.000	146.610.000
		10	Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial kab. Grobogan	92,20	245.000.000	225.900.000
		11	Rekonsiliasi Realisasi SP2D	91,18	53.945.000	49.185.000
		12	Penyusunan Realisasi Triwulan dan Semeteran APBD TA. 2017	67,57	150.000.000	101.356.622
		13	Penyusunan LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2016	89,65	325.000.000	291.378.270
		14	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah dengan Aplikasi Simda	72,72	358.000.000	260.340.000
		15	Intensifikasi PBB P2	92,50	309.165.000	285.965.000
		16	Intensifikasi Pajak Daerah dan Pendapatan Lainnya	93,39	416.000.000	388.510.000
		17	Peningkatan Penarikan Tunggakan Pajak Terutang	100,00	59.270.000	59.270.000
		18	Pengelolaan Administrasi Pergeseran Anggaran SKPD se Kab. Grobogan TA. 2017	96,22	46.350.000	44.600.000
		19	Bintek Peningkatan Kinerja Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan	76,10	477.363.500	363.281.223
		20	Koordinasi Permasalahan Penatausahaan Keunagan dengan Instansi terkait	47,11	124.000.000	58.421.300
		21	Sosialisasi Perubahan Perda No. 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	100,00	64.000.000	64.000.000
		22	Pembentukan Basis Data SISMIOP PBB-P2 dan Peta Digital	100,00	274.415.000	274.415.000
		23	Koordinasi dan Verifikasi BPHTB	100,00	70.800.000	70.800.000
		24	Percepatan Pelunasan PBB-P2 Kab. Grobogan	96,26	416.825.000	401.225.000
		25	Koordinasi Pencairan Dana Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Langsung PPKD Lainnya dengan	91,01	60.000.000	54.603.500

		SKPD Teknis			
		26 Penyusunan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	81,60	150.000.000	122.400.000
		27 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	94,83	458.000.000	434.323.400
		28 Evaluasi Dana Perimbangan dan Bantuan Keuangan Propinsi	98,49	96.000.000	94.546.250
		29 Pengelolaan Kas Daerah	93,18	187.335.000	174.550.250
		30 Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa	99,71	63.000.000	62.816.750
		31 Penyusunan Perbup Pajak Parkir dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	100,00	65.000.000	65.000.000
		32 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penerapan Transaksi Non Tunai	92,83	100.000.000	92.825.000
		33 Pengembangan Penyusunan Anggaran dengan Aplikasi E Butdgeting	85,74	100.000.000	85.735.000
		34 Penyusunan Perbup tentang pedoman pengelolaan Blud	95,86	100.000.000	95.860.000
		35 Penetapan Status penggunaan Barang Milik Daerah	75,28	25.000.000	18.820.000
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah	1 Penatausahaan SKPD, SSPD dan Optimalisasi Peran Manpa dan UPTB	99,56	225.000.000	224.018.000
8	Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah	1 Pendataan Pajak daerah	100,00	50.000.000	50.000.000
		2 Pensertifikatan Tanah milik Kab. Grobogan	24,11	400.000.000	96.431.560
		3 Pencetakan SPPT PBB Th. 2018	90,84	165.740.000	150.565.000
		4 Pelayanan Administrasi PBB Th. 2017	97,29	66.379.000	64.579.000
		5 Penyediaan Blangko SSPD PBB dan BPHTB	96,05	126.330.000	121.340.000
		6 Penilaian Objek Pajak Khusus PBB-P2	92,14	77.040.000	70.985.000
		7 Optimalisasi Pendapatan Daerah	98,36	55.000.000	54.097.000
		8 Penyuluhan SPPT PBB-P2 Tahun 2017	99,32	84.646.000	84.071.000
		9 Pencetakan Kertas Continous Form SKPD dan SSPD	96,50	76.350.000	73.675.000
		10 Penyediaan Blangko Pelayanan PBB-P2	94,17	58.273.000	54.873.000

9	Program Peningkatan Pengelolaan asset Daerah	1	Orientasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	96,26	222.357.000	214.050.500
		2	Penyusunan Perbup Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Pengelolaan barang Milik Daerah	91,31	97.282.000	88.830.750
			JUMLAH	92,86	16.424.715.896	14.583.125.216

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan terletak di Jalan S. Parman Nomor 23 Purwodadi Grobogan, yang merupakan jantung ibu kota Kabupaten Grobogan. Letak ini merupakan lokasi yang sangat strategis, karena Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan mempunyai wilayah kerja di seluruh kabupaten. Sehingga dalam melaksanakan koordinasi ke dinas terkait lainnya tidak ada kendala.

Berdasarkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok fungsi, Uraian Tugas jabatan dan tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok “ ***Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan daerah*** ”. Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keuangan Daerah
- b. pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang keuangan Daerah
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang keuangan Daerah
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang keuangan Daerah
- e. Pengelolaan kesekretariatan Badan
- f . Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan konsep kebijakan teknis di bidang keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional
2. Merumuskan program kegiatan Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan

3. Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang keuangan daerah
4. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan
5. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang keuangan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal
7. Menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang didelegasikan
8. Menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di bidang keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
9. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
10. Menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
11. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi pendaftaran dan pendataan, penetapan, pemungutan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi daerah yang telah ditetapkan
12. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
13. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
14. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati
15. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
16. Melaksanakan dan mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
17. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan pengeluaran kas daerah
18. Melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak

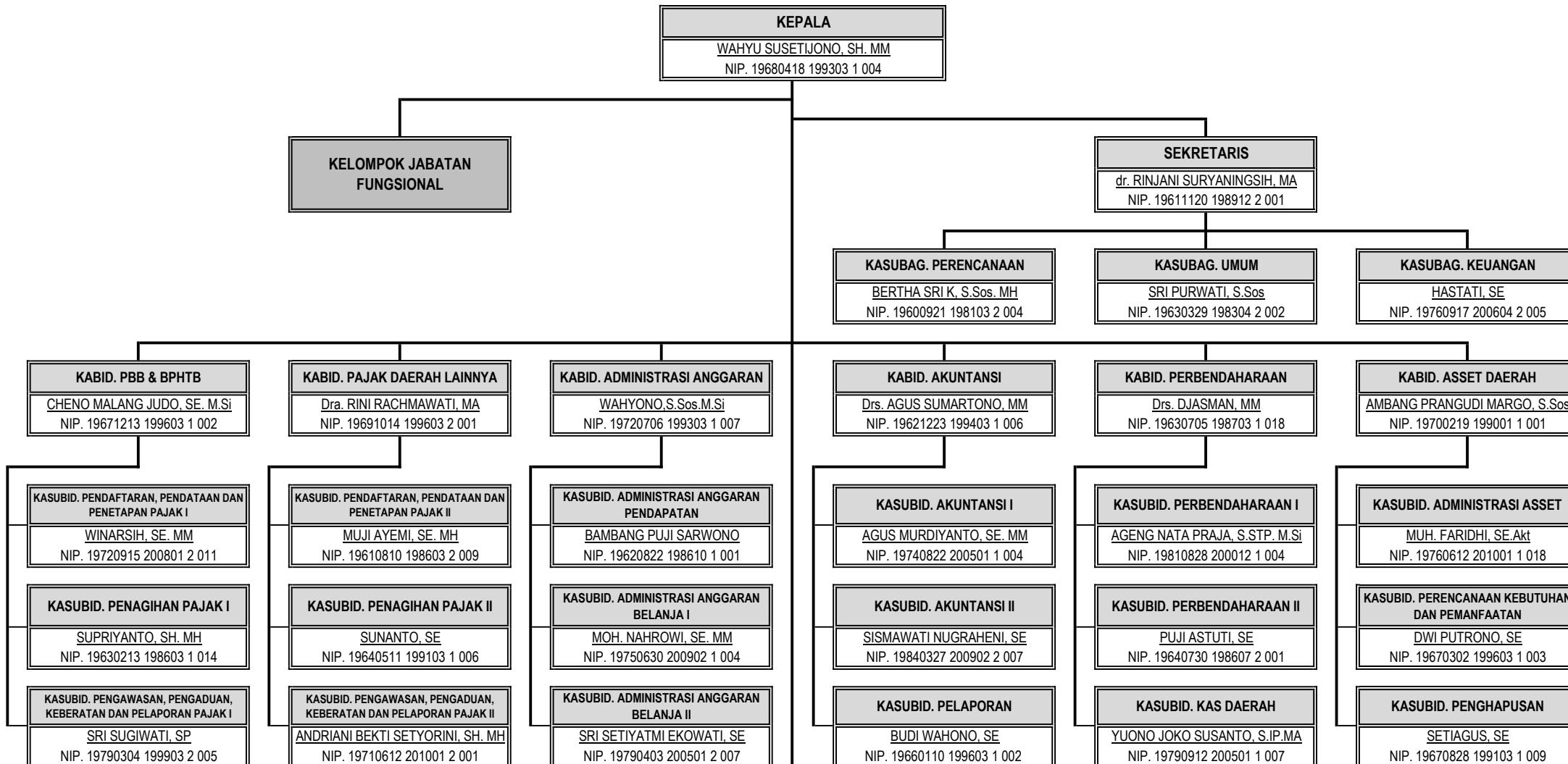
19. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
20. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
21. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah
22. Melaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
23. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
24. Melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
25. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pertanggungjawaban keuangan
26. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
27. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan
28. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengawasi pelaksanaan anggaran dinas
29. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab dinas
30. Melaksanakan pengelolaan asset daerah atau barang milik daerah/kekayaan daerah
31. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang di limpahkan oleh Bupati
32. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut
33. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia
34. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan
35. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan
36. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

1. Kepala BPPKAD

2. Bagian Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak I
 - b. Sub Bidang Penagihan Pajak I
 - c. Sub Bidang Pengawasan, pengaduan, keberatan dan pelaporan pajak I
4. Bidang Pajak Daerah Lainnya, Terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendaftaran Pendataan dan Penetapan Pajak II
 - b. Sub Bidang Penagihan Pajak II
 - c. Sub Bidang Pengawasan, pengaduan, keberatan dan pelaporan pajak II
5. Bidang Administrasi Anggaran, Terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Administrasi Anggaran Pendapatan
 - b. Sub Bidang Administrasi Anggaran Belanja I
 - c. Sub Bidang Administrasi Anggaran Belanja II
6. Bidang Akuntansi, Terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Akuntansi I
 - b. Sub Bidang Akuntansi II
 - c. Sub Bidang Pelaporan
7. Bidang Perbendaharaan, Terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan I
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan II
 - c. Sub Bidang Kas Daerah
8. Bidang Asset Daerah, Terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan pemanfaatan
 - b. Sub Bidang Administrasi Asset
 - c. Sub Bidang Penghapusan

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



Bagian Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan, menyelenggarakan administrasi umum , surat menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan Badan, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan meliputi pendaftaran, pendataan dan penetapan, penagihan, pengawasan, pengaduan, keberatan dan pelaporan Pajak I.

Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pajak daerah lainnya.

Bidang Administrasi Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang administrasi anggaran

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang akuntansi.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang perbendaharaan.

Bidang Asset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Asset Daerah.

2.3 Isu- Isu Strategis Tugas dan Fungsi PD

Isu-isu strategis merupakan permasalahan yang sifatnya sangat mendesak untuk ditangani dalam kurun waktu pelaksanaan. Adapun isu strategis yang disusun berdasarkan hasil analisis permasalahan dan kondisi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
2. Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan
3. Masih kurangnya kapasitas pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah
4. Belum optimalnya pengelolaan asset di setiap perangkat daerah

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan visi dari Bupati Grobogan yaitu “ *Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh*” serta Misi dari Bupati yang berkaitan dengan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yaitu “ *Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayan publik*”.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi untuk periode 2019. Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2019 sesuai dengan Renstra BPPKAD Tahun 2016-2021 adalah “ *Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan daerah*”. Sedangkan Sasaran sesuai dengan Renstra BPPKAD Tahun 2016-2021 adalah :

1. Mempertahankan opini keuangan daerah
2. Meningkatkannya PAD dan kualitas pengelolaan keuangan asset daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Pada Tahun 2019 merupakan rencana kerja tahun ketiga dari Rencana Strategis SKPD Tahun 2016 - 2021. Adapun Program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja OPD
- Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
- Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir tahun

- 6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**
 - Penyusunan Analisa Standar Belanja
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
 - Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
 - Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
 - Peningkatan Manajemen Investasi Daerah
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 - Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Peningkatan Manajemen Pengelolaan Administrasi Keuangan
 - Peningkatan Manajemen Pengelolaan Admininstrasi Perbendaharaan
 - Pengembangan Aplikasi E-Budgeting
- 7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah**
 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
- 8. Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah**
 - Optimalisasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
- 9. Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah**
 - Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

**DAFTAR USULAN PERUBAHAN KEGIATAN BELANJA LANGSUNG
APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

SATUAN KERJA : BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

No	Kode Rekening	KEGIATAN	Sasaran	Target	USULAN ANGGARAN TA. 2019	USULAN ANGGARAN TA. 2019 SETELAH PERUBAHAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	4. 4.5 404 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			3.313.000.000	4.222.577.500
1	4. 4.5 404 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	112.000.000	93.100.000
2	4. 4.5 404 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya kebutuhan komunikasi, listrik dan air Kantor DPPKAD Kab. Grobogan	12 bulan	120.000.000	120.000.000
3	4. 4.5 404 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran jasa sewa tanah PT. KAI	2 bidang	430.000.000	398.477.500
4	4. 4.5 404 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	200.000.000	200.000.000
5	4. 4.5 404 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan Alat Tulis Kantor DPPKAD Kabupaten Grobogan	12 bulan	500.000.000	500.000.000
6	4. 4.5 404 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Kantor DPPKAD Kab. Grobogan	12 bulan	100.000.000	100.000.000
7	4. 4.5 404 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	35.000.000	35.000.000

1	2	3	4	5	6	7
8	4. 4.5 404 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah dan tabloid lainnya	15 item	26.000.000	26.000.000
9	4. 4.5 404 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman untuk keperluan harian kantor, rapat dan tamu.	12 bulan	500.000.000	450.000.000
10	4. 4.5 404 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	12 bulan	1.000.000.000	2.300.000.000
11	4. 4.5 404 01 79	Penyediaan Kjasa Perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 bulan	75.000.000	-
12	4. 4.5 404 01 80	Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan	Terlaksananya pengelolaan administrasi perbendaharaan	12 bulan	215.000.000	-
	4. 4.5 404 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.175.000.000	1.090.660.000
13	4. 4.5 404 02 07	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor BPPKAD	12 bulan	500.000.000	440.660.000
14	4. 4.5 404 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2 paket	200.000.000	400.000.000
15	4. 4.5 404 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 bulan	100.000.000	100.000.000
16	4. 4.5 404 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	12 bulan	75.000.000	150.000.000
17	4. 4.5 404 02	Penataan Lingkungan Kantor BPPKAD	Tersedianya taman dan ruang pelayanan publik	2 paket	300.000.000	-
	4. 4.5 404 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			200.000.000	130.000.000
18	4. 4.5 404 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (pakaian batik tradisional dan pakaian olah raga)	210 stel	200.000.000	130.000.000

1	2	3	4	5	6	7
	4. 4.5 404 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.375.000.000	523.290.000
19	4. 4.5 404 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya dana untuk diklat/kursus bagi pegawai DPPKAD Kab. Grobogan	12 bulan	250.000.000	100.000.000
20	4. 4.5 404 05 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak	100 WP	50.000.000	45.000.000
21	4. 4.5 404 05 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bintek penyusunan anggaran berbasis kinerja	100 orang	115.000.000	378.290.000
22	4. 4.5 404 05	Bimbingan teknis Penatausahaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Bimbingan teknis penatausahaan Keuangan Daerah	1100 orang	490.000.000	-
23	4. 4.5 404 05	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Terlaksananya Pembekalan Penatausahaan Keuangan bagi pegawai BPPKAD	160 orang	470.000.000	-
	4. 4.5 404 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			857.945.000	428.690.000
24	4. 4.5 404 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Kinerja BPPKAD	16 dokumen	450.000.000	178.570.000
25	4. 4.5 404 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran	Triwulan dan Semester APBD Pemerintah Kab. Grobogan	554 buku	140.550.000	63.700.000
26	4. 4.5 404 06 04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	190 buku	267.395.000	186.420.000
	4. 4.5 404 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			7.480.555.000	4.140.395.000
27	4. 4.5 404 17 01	Penyusunan analisa standar belanja	Tersusunnya Perbup ASB	5 ASB	125.000.000	130.000.000
28	4. 4.5 404 17 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai mekanisme yang berlaku	120 buku	290.000.000	335.000.000
29	4. 4.5 404 17 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kab. Grobogan sesuai mekanisme yang berlaku	120 buku	310.000.000	360.000.000

1	2	3	4	5	6	7
30	4. 4.5 404 17 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perda APBD dan draf perubahan APBD	120 buku	300.000.000	380.000.000
31	4. 4.5 404 17 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya penyusunan Perbup APBD dan draf perubahan APBD	120 buku	325.000.000	380.000.000
32	4. 4.5 404 17 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Grobogan	150 buku	369.904.000	331.020.000
33	4. 4.5 404 17 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Perbup tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Grobogan	160 buku	406.340.000	200.995.000
34	4. 4.5 404 17 13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	12 bulan	515.660.000	64.500.000
35	4. 4.5 404 17 14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan APBD	100 orang	150.000.000	195.000.000
36	4. 4.5 404 17 15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya Bintek Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah	165 orang	293.651.000	684.325.000
37	4. 4.5 404 17 17	Peningkatan manajemen investasi daerah	Teridentifikasi Analisis Investasi	6 BUMD	100.000.000	118.000.000
38	4. 4.5 404 17 20	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monev pengelolaan dana transfer ke daerah	50 OPD	475.000.000	294.720.000
39	4. 4.5 404 17 21	Paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Penyusunan Perbup TPP, Bantuan keuangan, Hibah dan Bansos	3 Perbup	150.000.000	163.090.000
40	4. 4.5 404 17 23	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan	12 bulan	-	69.440.000
41	4. 4.5 404 17 24	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan	Terlaksananya pengelolaan administrasi perbendaharaan	12 bulan	-	353.680.000
42	4. 4.5 404 17 25	Pengembangan Aplikasi E- Budgeting	Terlaksananya pembuatan Aplikasi E-Budgeting	1 Aplikasi	-	80.625.000

1	2	3	4	5	6	7
43	4. 4.5 404 17 148	Penatausahaan Belanja PPKD	Terlaksananya Penatausahaan Belanja Bunga, Bagi hasil, bantuan keuangan, penatausahaan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga	12 bulan	500.000.000	-
44	4. 4.5 404 17 150	Penyusunan Pelaporan, Monitoring dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah Lainnya	Terlaksananya integrasi SIMDA Keuangan dan SIMDA Pendapatan	12 bulan	95.000.000	-
45	4. 4.5 404 17 151	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kab. Grobogan	100 Sertifikat	250.000.000	-
46	4. 4.5 404 17 153	Fasilitasi Pelayanan Perpajakan	Terlaksananya Pelayanan administrasi PBB-P2	5000 WP& 280 desa	275.000.000	-
47	4. 4.5 404 17 154	Penyusunan Pokok Ketetapan Pajak Terutang	Tersusunnya Dokumen Penertiban SPPT PBB-P2	800.000 SPPT	365.000.000	-
48	4. 4.5 404 17 155	Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan	Terlaksananya distribusi dan penyuluhan SPPT PBB-P2	280 desa	75.000.000	-
49	4. 4.5 404 17 156	Fasilitasi Percepatan Pelunasan PBB-P2	Terlaksananya penyerahan hadiah bagi desa dan kec. Lunas PBB-P2 lebih awal	219 desa& 6 Kecamatan	495.000.000	-
50	4. 4.5 404 17 157	Layanan Informasi Perpajakan Daerah	Terlaksananya Pemasangan sarana publikasi pajak daerah	1 reklame	160.000.000	-
51	4. 4.5 404 17 158	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Terlaksananya koordinasi penatausahaan keuangan dengan Instansi Terkait	49 OPD	75.000.000	-
52	4. 4.5 404 17	Perbup tentang Sistem Tunjangan Kinerja Daerah	Terlaksananya penyusunan Perbup tentang Sistem Tunjangan Kinerja Daerah	1 Perbup	150.000.000	-
53	4. 4.5 404 17	SIM Perhitungan Tambahan Penghasilan	Tersedianya SIM Perhitungan Tambahan Penghasilan	1 Aplikasi	50.000.000	-
54	4. 4.5 404 17	Pengembangan Aplikasi E-Budgeting, Penganggaran Hibah dan Bansos	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi E-Budgeting, Penganggaran Hibah dan Bansos	3 Aplikasi	150.000.000	-

1	2	3	4	5	6	7
55	4. 4.5 404 17	Evaluasi Penatausahaan Keuangan	Terlaksananya Evaluasi Penatausahaan	12 bulan	100.000.000	-
56	4. 4.5 404 17	Orientasi Pengelolaan BMD	Terlaksananya Orientasi Pengelolaan BMD	49 OPD	300.000.000	-
57	4. 4.5 404 17	Pembekalan Penatausahaan BMD	Terlaksananya Pembekalan Penatausahaan BMD	49 OPD	250.000.000	-
58	4. 4.5 404 17	Sosialisasi Perda dan Perbup BMD	Terlaksananya Sosialisasi Perda dan Perbup BMD	49 OPD	250.000.000	-
59	4. 4.5 404 17	Pengadaan Bingkai KIR	Terlaksananya Pengadaan Bingkai KIR	2500 buah	130.000.000	-
	4. 4.5 404 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi			445.000.000	-
60	4. 4.5 404 23 01	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersusunnya dokumen & sistem informasi terhadap layanan publik	2 dokumen	375.000.000	-
61	4. 4.5 404 23	Penarikan tunggakan PBB	Terlaksananya penarikan tunggakan PBB	12 bulan	70.000.000	-
	4. 4.5 404 29	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah			325.000.000	1.755.120.000
62	4. 4.5 404 29 01	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	280 desa	325.000.000	1.755.120.000

1	2	3	4	5	6	7
	4. 4.5 404 30	Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah			1.200.000.000	960.340.000
63	4. 4.5 404 30 01	Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	12 bulan	1.200.000.000	960.340.000
	4. 4.5 404 31	Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah			405.000.000	937.265.000
64	4. 4.5 404 31 01	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Asset Daerah	12 bulan	405.000.000	937.265.000
JUMLAH					16.776.500.000	14.188.337.500

Purwodadi, September 2018

**KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

WAHYU SUSETIJONO, SH. MM
NIP. 19680418 199303 1 004

BAB V

PENUTUP

Renja Perubahan-SKPD Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2019 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2016-2021 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Renja Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2019. Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2019 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Rencana kerja ini disusun disamping sebagai upaya untuk merespon kebutuhan pembangunan di tahun 2019, juga sebagai upaya untuk merumuskan berbagai aspek yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan khususnya BPPKAD, dan juga jumlah dana yang diperlukan.

Adanya Rencana Kerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Bupati Grobogan diharapkan akan lebih terkoodinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

WAHYU SUSETIJONO, SH. MM
NIP. 19680418 199303 1 004